

Dinamika Kawasan Asia Pascakolonial: Warisan Historis Konferensi Asia Afrika 1955 dalam Pembentukan Solidaritas Regional

Muhammad Darrel¹, Muhammad Surya Santoso² Pijar Syiffa Aditama³, Firstly Izzata Billah⁴

^{1,2,3,4}Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung,
Bandar Lampung, Indonesia

*Email Korespondensi: 2356071007@students.unila.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 18-10-2026
Disetujui 25-10-2026
Diterbitkan 27-10-2026

ABSTRACT

The 1955 Asian-African Conference (AAC) provided an important forum for Asian and African states to address postcolonial challenges and navigate the dynamics of great-power rivalry. This study examines the contribution of the AAC to the development of regional solidarity and cooperation norms in postcolonial Asia through Alexander Wendt's constructivist perspective. It employs a qualitative approach combining a literature review with document analysis. The study draws on President Sukarno's opening speech, academic literature, and relevant official publications. The analysis focuses on the concepts of common fate, social interaction, collective identity, and the reproduction and institutionalization of norms. The findings indicate that shared experiences of colonialism and the vulnerability of Asian states amid great-power rivalry did not, by themselves, produce solidarity among states. Rather, solidarity developed through diplomatic interactions and negotiations that brought together different interests and gradually fostered a shared understanding. This understanding was subsequently articulated in normative terms through the Bandung Principles, particularly the principles of sovereignty, equality, non-intervention, and peaceful settlement of disputes. These principles were later reproduced and further developed through various regional cooperation frameworks, including ASEAN, ZOPFAN, SEANWFZ, and NAASP. The study therefore argues that the AAC is better understood as a source of normative contribution to the development and continuity of regional solidarity. Its influence operated through the formation and reproduction of shared understandings rather than through a direct causal relationship between the AAC and the establishment of regional institutions.

Keywords: Asian-African Conference; regional solidarity; constructivism; Bandung Principles; cooperation norms

ABSTRAK

Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 menjadi ruang pertemuan penting bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi persoalan pascakolonial serta dinamika persaingan kekuatan besar. Penelitian ini membahas kontribusi KAA 1955 terhadap perkembangan identitas solidaritas dan norma kerja sama di kawasan Asia pascakolonial dengan menggunakan perspektif konstruktivisme Alexander Wendt. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data mencakup pidato pembukaan Presiden Soekarno, literatur akademik, dan berbagai publikasi resmi yang berkaitan dengan KAA. Analisis diarahkan pada konsep *common fate*, interaksi sosial, identitas kolektif, serta proses reproduksi dan pelebagaan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kolonialisme yang sama dan posisi negara-negara Asia dalam menghadapi

persaingan kekuatan besar belum dengan sendirinya menghasilkan solidaritas antarnegara. Solidaritas tersebut berkembang melalui rangkaian interaksi dan negosiasi diplomatik yang mempertemukan kepentingan yang berbeda hingga terbentuk pemahaman bersama. Pemahaman ini kemudian dirumuskan secara normatif dalam Dasasila Bandung, antara lain melalui prinsip kedaulatan, kesetaraan, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip tersebut terus muncul dan dikembangkan dalam berbagai kerangka kerja sama regional, termasuk ASEAN, ZOPFAN, SEANWFZ, dan NAASP. Temuan ini menunjukkan bahwa KAA lebih tepat dipahami sebagai sumber kontribusi normatif bagi perkembangan solidaritas regional. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pembentukan dan reproduksi pemahaman bersama, bukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung antara KAA dan terbentuknya institusi-institusi regional.

Katakunci: Konferensi Asia Afrika; solidaritas regional; konstruktivisme; Dasasila Bandung; norma kerja sama

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Darrel, M., Santoso, M. S., Aditama, P. S., & Billah, F. I. . (2026). *Dinamika Kawasan Asia Pascakolonial: Warisan Historis Konferensi Asia Afrika 1955 dalam Pembentukan Solidaritas Regional*. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11146-11157. <https://doi.org/10.63822/jwksb957>

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, kawasan Asia pada awal masa Perang Dingin berada dalam kondisi yang sangat rawan sebagai akibat dari proses dekolonisasi. Negara-negara yang baru meraih kemerdekaannya di Asia tidak hanya berjuang menghadapi tantangan pembangunan di dalam negeri, tetapi juga dihadapkan pada tekanan berat akibat persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Kemerdekaan politik yang baru saja diperoleh tidak secara otomatis memberikan kemandirian ekonomi maupun jaminan kedaulatan yang kuat. Keterbatasan sumber daya dan rapuhnya sistem pertahanan ini membuka peluang besar bagi negara-negara asing untuk ikut campur. Campur tangan eksternal tersebut antara lain berkaitan dengan upaya negara-negara besar memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan. (Acharya, 2018; Tan, 2016).

Di tengah himpitan persaingan antara blok kedua negara adidaya saat itu, para pemimpin di Asia mulai menyadari pentingnya membangun kesadaran bersama untuk melindungi kedaulatan negara mereka. Semangat untuk menolak ketergantungan dan perlawanan terhadap bentuk penjajahan gaya baru ini terekam dengan sangat jelas dalam pidato pembukaan Presiden Soekarno pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Dalam pidato bersejarah tersebut, Soekarno menegaskan betapa pentingnya penyatuan langkah dan kerja sama antarnegara Asia dan Afrika untuk menentukan nasib mereka sendiri secara mandiri tanpa dikendalikan oleh kekuatan dari luar (Sukarno, 1955). Peristiwa KAA 1955 kemudian menjadi sebuah tonggak sejarah yang menjadi salah satu momentum penting dalam konsolidasi gagasan mengenai persatuan dan kesetaraan antarnegara Asia-Afrika.

Kajian mengenai Konferensi Asia Afrika 1955 telah banyak mendapat perhatian dari para ahli dan akademisi Hubungan Internasional. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung melihat peristiwa ini dari sudut pandang politik global berskala makro. Penelitian yang dilakukan oleh Eslava dkk., (2017) memposisikan KAA 1955 sebagai pijakan awal bagi lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB) di panggung hukum dan politik internasional (Eslava dkk., 2017). Di sisi lain, Dinkel (2019) menyoroti bahwa penyelenggaraan konferensi tersebut sebagai pembentuk landasan organisasi bagi perlawanan politik kolektif antarnegara dunia ketiga dalam merespons kolonialisme global (Dinkel, 2019).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas posisi KAA 1955 dalam politik global, proses dekolonisasi, serta perkembangan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga, keterkaitan antara interaksi diplomatik yang berlangsung dalam KAA, terbentuknya identitas solidaritas, dan keberlanjutan norma tersebut dalam perkembangan kerja sama regional Asia masih belum banyak dibahas. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini melihat KAA 1955 dari perspektif dinamika kawasan Asia. KAA tidak hanya dipahami sebagai momentum penting dalam perkembangan solidaritas global, tetapi juga sebagai ruang pertemuan dan interaksi antarnegara yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama mengenai kedaulatan, kesetaraan, dan kerja sama. Atas dasar itu, penelitian ini menganalisis kontribusi KAA 1955 dalam membentuk identitas solidaritas dan norma kerja sama antarnegara di kawasan Asia pada periode pascakolonial.

KAJIAN TEORI

Pada kajian teori, untuk membedah dan menganalisis proses pembentukan solidaritas di kawasan Asia, penelitian ini menggunakan kerangka teori Konstruktivisme yang dikembangkan oleh Alexander

Wendt. Teori Konstruktivisme memiliki pandangan utama bahwa tatanan politik internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, melainkan oleh gagasan, norma, dan identitas yang terbangun melalui interaksi sosial antarnegara (Wendt, 1999a).

Wendt (1992) menegaskan bahwa sifat hubungan antarnegara dalam sistem internasional sangat ditentukan oleh bagaimana negara-negara tersebut saling memahami dan merespons satu sama lain melalui proses pergaulan sosial. Identitas dan kepentingan sebuah negara tidak bersifat kaku atau bawaan lahir, melainkan dapat berubah dan dibentuk kembali seiring berjalannya waktu melalui komunikasi serta pemaknaan nilai bersama.

Dalam konteks penelitian ini, Konferensi Asia Afrika 1955 diposisikan sebagai ruang interaksi sosial tempat terjadinya proses pembentukan norma dan identitas baru antarnegara Asia. Pertemuan para pemimpin Asia di Bandung memfasilitasi lahirnya kesepakatan nilai bersama yang kemudian dituangkan ke dalam Dasasila Bandung. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan prinsip tidak ikut campur atau nonintervensi secara bertahap membentuk cara pandang baru bagi negara-negara di kawasan Asia. Melalui teori Konstruktivisme Wendt, solidaritas Asia dipahami bukan sekadar sebagai aliansi politik sementara, melainkan sebagai hasil dari proses pembentukan sosial yang mengubah cara negara-negara Asia dalam menjaga keamanan dan tatanan kawasannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memanfaatkan studi pustaka dan penelaahan dokumen sebagai metode penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya melihat proses historis, pembentukan norma, dan perkembangan identitas solidaritas regional melalui berbagai dokumen diplomasi serta literatur ilmiah. Data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen yang berkaitan langsung dengan Konferensi Asia Afrika 1955, terutama pidato pembukaan Presiden Soekarno dan dokumen hasil konferensi, serta dokumen resmi kerja sama regional yang digunakan untuk menelusuri reproduksi prinsip-prinsip tersebut pada periode berikutnya.

Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara KAA 1955, pembentukan identitas solidaritas, perkembangan norma kerja sama, dan proses pelebagaan norma dalam hubungan regional. Literatur yang digunakan mencakup kajian konseptual maupun historis yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, dokumen resmi digunakan untuk melihat prinsip, gagasan, dan kesepakatan yang dihasilkan dalam KAA serta menelusuri perkembangan kerja sama regional pada periode setelahnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi dari berbagai basis data akademik serta laman resmi lembaga yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan menyeleksi dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian, mengidentifikasi informasi yang relevan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan konsep-konsep dalam perspektif konstruktivisme Alexander Wendt. Analisis difokuskan pada interaksi sosial antarnegara untuk melihat proses diplomasi dan negosiasi menuju KAA 1955, *common fate* untuk memahami pengalaman dan tantangan bersama, identitas kolektif untuk menganalisis terbentuknya pemahaman bersama mengenai kedaulatan, kesetaraan, dan kepentingan bersama, serta perkembangan dan pelebagaan norma untuk menelusuri reproduksi prinsip-prinsip Dasasila Bandung dalam kerja sama regional. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menjelaskan bagaimana interaksi dalam KAA

berkontribusi terhadap pembentukan pemahaman bersama dan bagaimana pemahaman tersebut memperoleh artikulasi normatif serta direproduksi dalam perkembangan kerja sama regional.

Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana interaksi antarnegara dalam KAA membentuk pemahaman bersama, bagaimana pemahaman tersebut memperoleh artikulasi melalui Dasasila Bandung, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut kemudian direproduksi dalam perkembangan kerja sama regional. Beberapa tema yang menjadi perhatian dalam analisis meliputi interaksi antarnegara, pengalaman dan tantangan yang dihadapi bersama, pembentukan identitas kolektif, perkembangan norma, serta proses internalisasi dan pelembagaan norma dalam kerja sama regional. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana KAA 1955 tidak hanya memiliki arti historis, tetapi juga turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan dan keberlanjutan identitas solidaritas serta norma kerja sama di kawasan Asia pascakolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geopolitik dan Kerentanan Asia Era Pascakolonial

Berakhirnya Perang Dunia II pada 1945 membawa perubahan besar terhadap tatanan politik internasional. Di kawasan Asia, periode ini juga ditandai dengan menguatnya perjuangan negara-negara untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan memperoleh kedaulatan. Kekalahan Jepang pada 1945 dan melemahnya kekuatan kolonial Eropa setelah Perang Dunia II membuka ruang politik bagi bangsa-bangsa Asia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menentukan arah pemerintahan mereka sendiri (Kennedy, 2016).

Walaupun beberapa negara di Asia telah berhasil meraih kemerdekaan, proses dekolonisasi masih terus berlangsung pasca peristiwa PD II. Sejumlah wilayah masih berada di bawah kekuasaan kolonial, sedangkan negara-negara yang baru merdeka harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak peninggalan kolonialisme hingga konflik wilayah dan ketidakstabilan politik (Acharya, 2018; Jia, 2025). Dengan itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan formal tidak serta-merta menghilangkan ketergantungan dan kerentanan negara-negara Asia terhadap pengaruh kekuatan eksternal.

Situasi pascaperang semakin kompleks ketika persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berkembang menjadi Perang Dingin. Persaingan kedua negara tersebut tidak hanya berlangsung melalui perbedaan ideologi kapitalisme dan komunisme, tetapi juga melalui upaya memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan di berbagai kawasan. Selanjutnya, kawasan Asia menjadi salah satu wilayah penting, terutama dalam persaingan tersebut. Kondisi ini terjadi karena perubahan politik akibat dekolonisasi berlangsung bersamaan dengan meningkatnya persaingan kepentingan strategis antara kedua blok. Sebagaimana contohnya, Perang Korea (1950–1953) menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Asia tidak terlepas dari persaingan antar kekuatan besar selama Perang Dingin (Martin, 2023). Situasi ini menegaskan bahwa persoalan keamanan di Asia turut dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik internasional yang lebih luas.

Bagi negara-negara Asia yang baru merdeka, persaingan kekuatan besar pada masa Perang Dingin menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan arah politik luar negeri. Dukungan internasional memang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, mendukung pembangunan nasional, dan menghadapi berbagai persoalan keamanan. Namun, keberpihakan kepada salah satu blok juga dapat mengurangi keleluasaan negara-negara tersebut dalam menentukan kepentingan dan kebijakan mereka sendiri. Situasi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa persaingan kekuatan besar dapat membuka ruang bagi tekanan maupun

intervensi terhadap negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan (Lee, 2009; Tan, 2016). Karena itu, tantangan yang dihadapi negara-negara Asia pada awal 1950-an tidak berhenti pada upaya membebaskan diri dari kolonialisme. Mereka juga harus mencari cara untuk mempertahankan kedaulatan dan menentukan posisi politiknya di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin kuat.

Di samping itu juga, ancaman tersebut tidak selalu menghasilkan respons yang sama di antara negara-negara Asia. Perbedaan sistem politik, ideologi, kepentingan keamanan, serta hubungan dengan negara-negara besar membuat setiap negara di kawasan Asia memiliki pandangan dan sikap yang berbeda dalam menghadapi perkembangan Perang Dingin. Meski demikian, perbedaan kepentingan dan orientasi politik di antara negara-negara Asia menyulitkan upaya membangun persatuan di tingkat regional. Walaupun sama-sama pernah mengalami kolonialisme, negara-negara Asia memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang beragam dalam menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok (Utama, 2016). Dengan demikian, solidaritas pascakolonial tidak terbentuk secara otomatis hanya karena kesamaan pengalaman sejarah. Akan tetapi memerlukan ruang dialog untuk mempertemukan kepentingan dan merumuskan prinsip bersama.

Dinamika KAA 1955 sebagai Ruang Pembentukan Solidaritas Regional

Maka dari itu dari arti pentingnya dalam upaya menciptakan solidaritas tersebut, dibentuknya Konferensi Asia Afrika (KAA) yang digelar di Bandung pada 18-24 April 1955. Pertemuan tersebut mempertemukan 29 negara dari kawasan Asia dan Afrika yang memiliki kepentingan serta kondisi politik berbeda. Kemudian, di tengah keberagaman tersebut, Konferensi Asia-Afrika menjadi wadah untuk merumuskan pandangan bersama mengenai persoalan yang dihadapi negara-negara peserta, mulai dari pembebasan diri dari kolonialisme, penguatan hubungan ekonomi dan kebudayaan, penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri, hingga terciptanya perdamaian internasional (Kemlu RI, 2025). KAA 1955 berlangsung di tengah perbedaan kepentingan dan latar belakang politik negara-negara pesertanya. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menggunakan konferensi sebagai ruang diplomasi dan mencari titik temu dalam sejumlah persoalan bersama. Melalui pertemuan tersebut, negara-negara Asia dan Afrika dapat membangun kesepahaman mengenai pentingnya kedaulatan, kesetaraan, dan kerja sama, tanpa harus menyamakan orientasi politik masing-masing (Umar dkk., 2025)

Digelarnya KAA yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika berujung menghasilkan prinsip-prinsip yang disebut “Dasasila Bandung”. Prinsip ini memuat sepuluh poin yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan pada setiap negara tanpa mencampuri urusan dalam negerinya. Selain itu, peserta KAA menegaskan pentingnya menjunjung persamaan derajat antarnegara, larangan campur tangan dalam urusan domestik, penyelesaian sengketa secara damai, serta pengembangan kerja sama dan kepentingan bersama (Museum Konferensi Asia Afrika, t.t.; Tan & Acharya, 2008). Prinsip-prinsip ini dapat dipahami sebagai upaya negara-negara Asia dan Afrika untuk membangun dasar hubungan internasional yang tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau kepentingan negara adidaya, tetapi juga oleh pengakuan atas kedaulatan dan kesetaraan negara.

Proses menuju KAA 1955 memperlihatkan bahwa solidaritas di antara negara-negara Asia dan Afrika tidak terbentuk secara spontan. Kesepahaman tersebut lahir melalui serangkaian pertemuan, komunikasi, dan negosiasi yang mempertemukan berbagai kepentingan negara peserta. Atas dasar tujuan tersebut, bukan semata-mata kesamaan pengalaman kolonial. Kemudian, mengalami wacana penyelenggaraan konferensi yang muncul dalam Konferensi Kolombo pada April 1954 kemudian dibahas lebih lanjut oleh lima negara sponsor, yakni Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Ceylon, dalam

pertemuan di Bogor pada 28–29 Desember 1954 (Museum Konferensi Asia Afrika, t.t.). Di sela pertemuan tersebut menyepakati agenda, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang. Benvenuti (2022) memperlihatkan bahwa sikap India yang mendukung gagasan Indonesia juga berkaitan dengan pertimbangan strategis India dalam menyikapi kebijakan Amerika Serikat serta peran Tiongkok di tengah persaingan Perang Dingin. Dengan demikian, pelaksanaan KAA tidak hanya mencerminkan semangat solidaritas negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme, tetapi juga memperlihatkan adanya kepentingan diplomatik yang ingin diperjuangkan oleh masing-masing negara peserta.

Warisan Historis pada Arsitektur Regional Asia

Selanjutnya, pada Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung pada 18–24 April 1955 memberikan pengaruh normatif terhadap perkembangan kerja sama regional di Asia, termasuk dalam pembentukan prinsip-prinsip yang kemudian memengaruhi perkembangan regionalisme Asia Tenggara (Tan & Acharya, 2008). Konferensi ini berlangsung ditengah tegangnya Perang Dingin saat itu, mengenai persoalan perjuangan Asia- Afrika atas dasar kemerdekaan dan persoalan colonial yang masih belum terselesaikan seperti Irian Barat, Kashmir, dan Palestina. Ketidakmampuan PBB dalam menangani berbagai konflik inilah yang mendorong negara- negara di Asia- Afrika untuk memperkuat solidaritas dan membangun kerja sama berdasarkan kepentingan Bersama.

Gagasan KAA berawal dari Konferensi Kolombo yang dilaksanakan pada tahun 1954 yang melibatkan, Ceylon, Birma, India, Indonesia, dan Pakistan. Pertemuan ini didasari dari keinginan negara-negara Asia- Afrika untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi kolonialisme dan menjaga perdamaian dunia. KAA kemudian menghasilkan Dasasila Bandung yang memuat prinsip- prinsip dasar hubungan antarnegara, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan, persamaan derajat dan penyelesaian konflik secara damai.

Warisan KAA dalam perkembangan institusi regional dapat dilihat melalui dua aspek. Pertama, KAA memperkuat pola kerja sama yang didasarkan pada solidaritas, kepentingan Bersama, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara (Engel, 2019). (Karns & Mingst, 2010) menjelaskan bahwa identitas dan ideologi turut memengaruhi pembentukan organisasi internasional. Jika organisasi internasional seperti NATO berkembang dalam konteks ideologi liberal barat. Kerja sama di berbagai negara berkembang banyak dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme, prinsip non-intervensi, dan gagasan solidaritas antarkawasan. Kedua, semangat KAA kembali diwujudkan melalui pembentukan *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) dalam KTT Asia- Afrika untuk memperkuat kerja sama pada abad ke-21. Hal inilah yang membuat warisan KAA tidak hanya berupa sebuah solidaritas namun juga menjadi sebuah rujukan bagi pengembangan kerangka kerja sama antarkawasan (Assie-Lumumba, 2015).

Dasasila Bandung dan Prinsip Non-Intervensi pada Arsitektur Keamanan Asia Tenggara

Warisan Dasasila Bandung dapat dilihat dalam prinsip- prinsip yang mendasari kerja sama dan keamanan ASEAN. Dasasila menekankan standar penghormatan terhadap sebuah kedaulatan dan integritas teritorial dan larangan intervensi terhadap urusan dalam negeri serta penyelesaian sengketa secara damai (Syukur dkk., 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pembentukan ASEAN melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Deklarasi ini menetapkan tujuan memperkuat kerja sama ekonomi, sosial budaya, dan Pendidikan sekaligus perdamaian stabilitas kawasan berdasarkan penghormatan terhadap keadilan, supremasi hukum, dan piagam PBB (Syukur dkk., 2023).

Kesinambungan ini berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip bebas berarti tidak memihak blok manapun, sedangkan prinsip aktif menekankan keterlibatan Indonesia dalam menaga perdamaian dan mengembangkan kerja sama internasional. Saat masa Orde Baru, ASEAN menjadi salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia dan sebagai wadah kerja sama yang dapat memperkuat hubungan antarnegara tanpa menjadikan perbedaan sistem politik sebagai penghalang. Pendekatan inilah yang sejalan dengan semangat Dasasila Bandung yang menekankan persamaan kedaulatan dan penghormatan terhadap kepentingan Bersama.

Prinsip non-intervensi kemudian menjadi salah satu karakteristik utama pada ASEAN. Organisasi ini sangat mengutamakan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota dan menghindari campur tangan dalam urusan domestik masing-masing negara (Suzuki, 2021). Meski demikian, ASEAN tetap menyediakan ruang dialog untuk mengelola perselisihan antarnegara. Sebagai contoh perkembangan sengketa Sabah antara Malaysia dan Filipina yang memperlihatkan pergeseran konfrontasi menuju pendekatan kerja sama yang turut mendukung penerapan prinsip non-intervensi dan penyelesaian sengketa secara damai dalam hubungan regional (Kadir, 2024).

Komitmen pada keamanan kawasan diwujudkan melalui deklarasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Inisiatif ini bertujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai. Komitmen ini diperkuat melalui *Declaration of ASEAN Concord* pada KTT ASEAN pertama di Bali, 23-24 Februari 1976 serta penandatanganan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) di Bangkok pada 15 Desember 1995 (*Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*, 1995). Berbagai instrumen ini menunjukkan upaya ASEAN membangun keamanan regional melalui kerja sama dan pengurangan ancaman eksternal. (ASEAN, 2012). Kesinambungan prinsip Dasasila Bandung juga tercermin dalam konsep ketahanan regional ASEAN. Di mana keamanan Kawasan tidak dipahami hanya dengan kekuatan militer namun juga melirik dari aspek saling menghormati dan penghindaran ancaman maupun penggunaan kekerasan.

Konstruksi Identitas Kawasan Pascakolonial dalam Perspektif Konstruktivisme

Dalam kerangka konstruktivisme Alexander Wendt, struktur internasional dipahami sebagai struktur sosial yang dibentuk oleh gagasan bersama dan berkembang melalui interaksi antarnegara, bukan semata-mata oleh kekuatan material (Wendt, 1992b, 1999b). Berdasarkan kerangka tersebut, perkembangan kerja sama Asia-Afrika dapat dipahami sebagai proses pembentukan identitas kawasan yang berawal dari pengalaman historis yang sama dilanjutkan dengan interaksi diplomatik dan diperkuat melalui pelebagaan norma dalam arsitektur regional.

Pada awal Perang Dingin, negara-negara Asia-Afrika menghadapi krisis yang hampir serupa, mulai dari dampak kolonialisme hingga ketergantungan pasca kemerdekaan dan tekanan persaingan Amerika Serikat juga Uni Soviet. Konflik di Korea dan Indocina turut memperbesar kekhawatiran terhadap adanya intervensi kekuatan eksternal. Dalam pemikiran Wendt, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *common fate*, yaitu keadaan ketika aktor menghadapi nasib atau tantangan bersama yang berpotensi mendorong terbentuknya identitas kolektif. Namun, kesamaan pengalaman kolonialisme ini tidak serta merta langsung menghasilkan solidaritas karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa identitas kawasan bukan sesuatu yang terbentuk secara otomatis tapi dipupuk dari hasil proses sosial dan pemaknaan bersama.

Proses tersebut memperoleh ruang melalui Konferensi Asia-Afrika 1955. Berawal dari Konferensi Kolombo, gagasan KAA dimatangkan dalam pertemuan Bogor pada 28-29 Desember 1954, sebelum

diwujudkan di Bandung pada 18-24 April 1955 dengan melibatkan 29 negara peserta (Utama, 2017). Rangkaian ini menunjukkan bahwa solidaritas Asia- Afrika dibangun melalui negosiasi mengenai tujuan, agenda, dan kepentingan bersama. Negara- negara peserta mulai menempatkan diri sebagai aktor yang memiliki hak menentukan arah politik pada masa depannya sendiri.

Dukungan India terhadap gagasan Indonesia juga dilandasi kalkulasi strategis terhadap kebijakan Amerika Serikat dan peran Tiongkok memperlihatkan bahwa identitas kolektif terbentuk berdampingan dengan kepentingan nasional masing-masing (Benvenuti, 2022). Dalam kerangka Wendt, hal ini tidak menjadi kelemahan argumen. Identitas dan kepentingan saling membentuk, dan kepentingan strategis dapat menjadi pintu masuk bagi proses identifikasi yang lebih dalam. Solidaritas Asia-Afrika dengan demikian dibaca sebagai identitas yang dikonstruksi, bukan seragam. Dalam perspektif konstruktivisme Wendt, rangkaian interaksi dan diplomasi antarnegara sebelum KAA dapat dilihat sebagai proses yang turut membentuk pemahaman bersama mengenai kepentingan dan identitas kawasan. Meskipun setiap negara tetap memiliki kepentingan nasional yang berbeda, interaksi tersebut membuka ruang bagi negara-negara peserta untuk menemukan sejumlah prinsip dan kepentingan yang dapat diterima serta disepakati secara bersama.

Hasil penting dari proses tersebut adalah Dasasila Bandung, yang memuat prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial sampai dengan penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku antarnegara, tetapi juga menjadi artikulasi dari pemahaman bersama mengenai kedaulatan, kesetaraan, dan kepentingan bersama yang berkembang dalam interaksi negara-negara Asia dan Afrika. Dalam perspektif konstruktivisme Wendt, pemahaman bersama tersebut penting karena identitas dan kepentingan negara tidak hanya terbentuk dari kondisi material, tetapi juga melalui proses interaksi sosial antaraktor. Sebagaimana dijelaskan Karns dan Mingst (2010), pembentukan organisasi regional turut dipengaruhi oleh identitas dan ideologi.

Reproduksi dan Pelembagaan Norma dalam Arsitektur Kawasan

Selanjutnya, Wendt menjelaskan bahwa internalisasi norma dapat berlangsung melalui tiga derajat, yaitu paksaan, kepentingan (*self-interest*), dan legitimasi (Wendt, 1999a). Dalam penelitian ini, konsep internalisasi digunakan secara terbatas untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip yang berkembang dalam KAA memperoleh penerimaan dalam praktik kerja sama regional. Penelitian tidak menempatkan kepatuhan terhadap norma sebagai bukti bahwa norma telah sepenuhnya terinternalisasi, tetapi melihat keberulangan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai kerangka kerja sama sebagai indikasi reproduksi dan pelembagaan norma.

Selanjutnya, dalam kerangka Wendt, legitimasi merupakan tingkat internalisasi ketika norma diterima sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Dalam penelitian ini, keberulangan prinsip-prinsip tersebut dalam kerja sama regional digunakan untuk melihat reproduksi dan pelembagaan norma, bukan untuk menyimpulkan bahwa norma telah mencapai tingkat internalisasi legitimasi. Kemudian, dalam konteks Asia Tenggara, perkembangan ASEAN menunjukkan adanya kesinambungan normatif dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam Dasasila Bandung.

Kesinambungan tersebut dapat dilihat melalui penggunaan prinsip kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerja sama dalam perkembangan kerja sama regional. Penggunaan prinsip kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerja sama yang terus muncul dalam berbagai kerangka regional menunjukkan bahwa norma-norma tersebut mengalami proses

reproduksi. Prinsip yang sama kemudian kembali digunakan dan diterapkan melalui berbagai institusi serta mekanisme kerja sama regional. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk pelembagaan normatif. Namun, temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa norma-norma tersebut telah sepenuhnya diinternalisasi oleh seluruh negara anggota.

Pertama, Deklarasi Bangkok 1967 memuat tujuan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan pada keadilan, supremasi hukum, dan Piagam PBB (The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration), 1967). Kedua, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dengan ASEAN ditempatkan sebagai soko guru, dirumuskan dengan merujuk “semangat Dasasila Bandung” dan prinsip bahwa masalah Asia hendaknya diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri (Agustin dkk., 2020). Ketiga, prinsip non-intervensi ASEAN berjalan berdampingan dengan upaya menjaga stabilitas hubungan antarnegara anggota, sebagaimana terlihat dalam penanganan sengketa Sabah serta ketegangan Indonesia–Singapura pada 1968 (Jorgensen-Dahl, 1975; Marzuki, 2017). Keempat, melalui Deklarasi ZOPFAN pada 1971 dan pembentukan Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 1995, negara-negara ASEAN semakin memperkuat gagasan mengenai kawasan yang damai, bebas, dan netral serta terbebas dari campur tangan kekuatan eksternal. Kelima, konsep ketahanan regional, yang menekankan konsultasi dan saling menghormati alih-alih politik kekuatan, menunjukkan bahwa norma tersebut telah membentuk cara negara-negara anggota memahami keamanannya.

Kemudian, pada tingkat yang lebih luas, peluncuran *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) pada 2005 untuk menghidupkan kembali “Semangat Bandung” memperlihatkan bahwa identitas ini direproduksi lintas generasi, sehingga KAA berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi kerja sama yang lahir kemudian. Karenanya, proses tersebut menunjukkan bahwa warisan normatif KAA tidak hanya menjadi bagian dari sejarah pada 1955, tetapi juga terus dirujuk dalam perkembangan kerja sama regional pada periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, pengaruh historis KAA tidak dapat dipahami sebagai hubungan sebab-akibat secara langsung terhadap terbentuknya setiap institusi regional. Pengaruh tersebut lebih tepat dilihat sebagai sumber nilai dan norma yang turut membentuk serta mempertahankan identitas dan pola kerja sama di kawasan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan bahwa Konferensi Asia Afrika (KAA) tidak secara langsung menciptakan solidaritas regional, tetapi menyediakan ruang interaksi diplomatik yang memungkinkan negara-negara Asia-Afrika membentuk pemaknaan bersama. Karenanya, pemaknaan tersebut dikristalisasi dalam Dasasila Bandung, kemudian direproduksi dan dilembagakan dalam arsitektur kerja sama kawasan seperti ASEAN.

Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 merupakan momentum yang penting dalam membentuk kekuatan dan solidaritas regional di kawasan Asia pascakolonial yang dilakukan lewat jalur diplomasi dengan tujuan penguatan identitas kolektif antarnegara. Dengan adanya konferensi ini menunjukkan bahwa pengalaman yang dirasakan bersama pascakolonial dan kerentanan terhadap persaingan kekuatan negara-negara besar tidak akan secara otomatis menghasilkan sebuah solidaritas. Interaksi antar negara yang membangun kesepahaman di tengah adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi.

Kemudian, dalam perspektif konstruktivisme Alexander Wendt, KAA adalah ruang sosial yang mendorong negara-negara Asia-Afrika sebagai aktor yang memiliki hak menentukan arah politik dan masa depan sendiri. Kesepahaman ini kemudian memperoleh landasan normatif melalui Dasasila Bandung khususnya terhadap kedaulatan suatu negara, non-intervensi dan penyelesaian sengketa damai. Pengaruh

historis KAA dapat dilihat dari perkembangan arsitektur di wilayah Asia terutama melalui ASEAN, Penerapan prinsip perdamaian seperti ZOPFAN dan pembentukan *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) pada 2005. Warisan KAA membawa nilai bahwa solidaritas regional dapat dipertahankan walaupun kepentingan nasional dan orientasi politik sering menjadi tantangan bagi integritas kawasan. KAA menjadi salah satu fondasi pemikiran dan juga prinsip bagi pembentukan tatanan regional yang menempatkan kedaulatan, kesetaraan dan kerja sama sebagai sebuah landasan hubungan antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- Agustin, P. A., Andriyani, L., & Setiawan, A. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERAN AKTIF INDONESIA DALAM KERJA SAMA NAASP. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(1), 41–53. <https://doi.org/10.24853/independen.1.1.41-53>
- ASEAN. (2012). *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*. <https://asean.org/treaty-on-the-southeast-asia-nuclear-weapon-free-zone/>
- Assie-Lumumba, N. T. (2015). Behind and beyond Bandung: Historical and forward-looking reflections on south-south cooperation. *Bandung: Journal of the Global South*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s40728-014-0011-5>
- Benvenuti, A. (2022). Nehru's Bandung moment: India and the convening of the 1955 Asian-African conference. *India Review*, 21(2), 153–180. <https://doi.org/10.1080/14736489.2022.2080489>
- Dinkel, J. (2019). *The Non-Aligned Movement: Genesis, organization and politics (1927-1992)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004336131>
- Engel, S. (2019). South–South Cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 218–242. <https://doi.org/10.1177/1868103419840456>
- Eslava, L., Fakhri, M., & Nesiah, V. (Ed.). (2017). *Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316414880>
- Jia, B. B. (2025). From Asian-African Solidarity to a Community of Common Destiny: An Evolving Chinese Perspective of the International Legal Order. *AJIL Unbound*, 119, 199–203. <https://doi.org/10.1017/aju.2025.10023>
- Jorgensen-Dahl, A. (1975). *Southeast Asia and theories of regional integration*. The Australian National University. <https://doi.org/10.25911/5D74E411896F6>
- Kadir, N. (2024). RESOLVING THE CONFLICTS BETWEEN THE PHILIPPINES AND MALAYSIA: MEDIATION ON THE SABAH DISPUTE AND ITS IMPACT ON SOCIO-ECONOMIC COOPERATION (1986-1998). *Journal of International Studies*, 20(2), 119–147. <https://doi.org/10.32890/jis2024.20.2.5>
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2010). *International organizations: The politics and processes of global governance* (2nd ed). Lynne Rienner Publishers.
- Kemlu RI. (2025, Maret 26). *Gerakan Non-Blok (GNB)*. <https://www.kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/gerakan-non-blok-gnb?type=publication>

- Kennedy, D. (2016). 2. Global war's colonial consequences. Dalam D. Kennedy, *Decolonization* (hlm. 25–45). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199340491.003.0003>
- Lee, C. J. (2009). AT THE RENDEZVOUS OF DECOLONIZATION: The Final Communiqué of the Asian-African Conference, Bandung, Indonesia, 18–24 April 1955. *Interventions*, 11(1), 81–93. <https://doi.org/10.1080/13698010902752806>
- Martin, B. (2023). American Imperial Sovereignty and Militarised Land Dispossession During the Korean War. *Geopolitics*, 28(5), 2111–2141. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2124159>
- Marzuki, K. (2017). *Indonesia-Singapore Relations: The Next 50 Years*. <https://rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co17154-indonesia-singapore-relations-the-next-50-years/>
- Museum Konferensi Asia Afrika. (t.t.). Sejarah Konferensi Asia Afrika KONDISI DUNIA INTERNASIONAL SEBELUM KONFERENSI ASIA AFRIKA. *Museum Konferensi Asia Afrika*.
- Sukarno. (1955). Opening address given by Sukarno (Bandung, 18 April 1955). Dalam *Asia-Africa speak from Bandung* (hlm. 19–29). <https://www.cvce.eu/s/30>
- Suzuki, S. (2021). Interfering via ASEAN? In the Case of Disaster Management. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 400–417. <https://doi.org/10.1177/18681034211016865>
- Syukur, Y., ASEAN Writers Network, & Mata Kata Inspirasi (Publisher) (Ed.). (2023). *ASEAN: Episentrum pertumbuhan dunia: gagasan konstruktif masyarakat dunia* (Cetakan pertama). Mata Kata Inspirasi.
- Tan, S. S. (2016). *Multilateral Asian security architecture: Non-ASEAN stakeholders*. Rotuledge. <https://doi.org/10.4324/9781315696782>
- Tan, S. S., & Acharya, A. (Ed.). (2008). *Bandung revisited: The legacy of the 1955 Asian-African Conference for international order*. NUS Press.
- The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) (1967). <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/0719.pdf>
- Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (1995). <https://agreement.asean.org/media/download/20131230234315.pdf>
- Umar, A. R. M., Yuana, S. L., Hakim, L., & Mas'ood, M. (2025). Bandung Conference 70 Years On: Visions of Decolonisation for a Multipolar World Order. *Global South Review*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.106735>
- Utama, W. S. (2016). From Brussels to Bogor: Contacts, Networks and the History of the Bandung Conference 1955. *JOURNAL OF INDONESIAN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (JISSH)*, 6(1), 11–24.
- Utama, W. S. (2017). *Konferensi Asia-Afrika, 1955: Asal-usul intelektual dan warisannya bagi gerakan global antiimperialisme* (Cetakan pertama). Marjin Kiri.
- Wendt, A. (1992a). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, A. (1992b). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391–425.
- Wendt, A. (1999a). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Wendt, A. (1999b). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.